

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Timlo

Wilayah: Kabupaten Karanganyar

Tujuh Parpol Ditagih LPJ Rp1,176 Miliar

<https://timlo.net/baca/124245/tujuh-parpol-ditagih-lpj-rp-1176-miliar/>

Karanganyar — Sebanyak tujuh partai politik pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Karanganyar belum juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan Rp 1,176 Miliar. Tujuh parpol tersebut adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN dan Demokrat.

“Desember ini harusnya rampung semua. Termasuk pemeriksaan LPJ bantuan keuangan parpol. Padahal ini sudah memasuki Desember, namun satupun LPJ belum ada yang masuk,” kata Kasubdit Poldagri Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, Joko Warsanto kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (3/12).

Ia mengatakan LPJ penggunaan bantuan keuangan Parpol tersebut sedianya diserahkan sebelum Desember 2020. Sebab, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan waktu pula untuk melakukan pemeriksaan laporan tersebut.

Kondisi demikian bukan menjadi hal baru bagi dirinya. Penyerahan LPJ mepet pergantian tahun hampir selalu dilakukan parpol penerima dana hibah. Padahal, parpol tersebut diyakini sudah melaksanakan beragam kegiatan

bersumber dana bantuan itu. Adapun kegiatan bersumber dana bantuan parpol seperti sosialisasi politik ke kader, pembelian alat tulis kantor dan konsumsi yang menyertai kegiatan itu.

Berdasarkan perolehan jumlah suara sah pada Pileg 2019 di lima dapil, PDIP meraup dana hibah tertinggi di 2020. Yakni Rp 349.277.501. Diikuti Partai Golkar Rp 331.962.624 dengan 145.152 suara sah. Lalu PKS Rp 146.676.745 dengan 64.135 suara sah. Dana hibah paling sedikit diterima Partai Demokrat Rp 61.373.932. Joko mengatakan, per suara setara Rp 1.500 berdasar standar nasional. Diprediksi, nominal per suara naik Rp 400 pada 2021. Dalam draft pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dana bantuan keuangan keuangan tujuh parpol Rp 1,3 Miliar.

“Dana yang tidak habis meski sudah selesai tahun anggaran, dapat dipakai lagi di tahun berikutnya namun dengan kegiatan yang berbeda. Secara umum, semua terserap habis. Besaran dana tergantung perolehan suara sah dan pengajuan dari parpol itu sendiri. Nanti entah disetujui atau tidak, tergantung kebijakan pemerintah,” katanya.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH